KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Ketenagalistrikan, akomodasi transisi energi terbarukan
Tanggal : Selasa, 02 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Ketenagalistrikan

Akomodasi Transisi Energi Terbarukan

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terus dikebut. Senayan menjanjikan *beleid* yang sudah berusia 15 tahun ini akan tuntas tahun depan.

Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menyatakan, UU Ketenagalistrikan sudah berusia 15 tahun. Banyak pasal dalam undang-undang tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan kemandirian energi serta keadilan bagi masyarakat.

"Kami mengambil inisiatif untuk merevisinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya dalam hal kemandirian energi, keadilan dan persiapan menuju energi terbarukan," ucap Syarif dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Syarif menargetkan revisi undang-undang ini dapat rampung pada 2026. Tujuannya, untuk memberi kepastian akses listrik kepada masyarakat dan juga keadilan dalam pemanfaatannya.

Dia membeberkan, revisi UU Ketenagalistrikan akan mengakomodasi transformasi energi, termasuk rencana transisi energi menuju energi terbarukan. Langkah ini untuk mewujudkan peta jalan transisi energi sebagaimana yang telah disiapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pemerintah bersama *stakeholder* (pemangku kepentingan) sudah mempersiapkan roadmap (peta jalan), target bauran energi terbarukan hingga tahun 2029," kata Syarif.

Syarif mendorong pelaksanaan program listrik desa yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan listrik di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Apalagi, PLN saat ini tengah melaksanakan program listrik desa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar 100 persen masyarakat di Indonesia mendapatkan akses listrik.

Selain itu, Syarif mendorong subsidi listrik benar-benar tepat sasaran demi terwujudnya keadilan energi di Tanah Air. Jangan sampai subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak.



Syarif Fasha

"Melalui revisi undang-undang ini, kami ingin memastikan aturan turunannya lebih jelas dan tegas," kata politikus NasDem ini.

Anggota Komisi XII DPR Aqib Ardiansyah menambahkan, UU Ketenagalistrikan sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika terkini, termasuk transisi energi bersih dan meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat. RUU ini diyakini lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan.

"Kami juga berkomitmen mengeluarkan kebijakan yang adil dan berorientasi kepada jangka panjang," ujarnya, Senin (1/9/2025).

Aqib menjelaskan, proyeksi nasional menunjukkan konsumsi listrik akan meningkat signifikan, dari 306 terawatt hour (TWh) pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Meski rasio elektrifikasi sudah tinggi, mencapai 99,83 persen pada 2024, tantangan dalam pemerataan beban, kualitas layanan, dan keandalan pasokan masih harus diatasi.

"Perlu regulasi baru yang mampu menjawab dinamika sektor ketenagalistrikan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata politikus PAN ini.

Dalam penyusunan UU Ketenagalistrikan, lanjutnya, Komisi XII DPR memperbarui aturan lama sekaligus memastikan listrik nasional tetap andal, terjangkau dan berkelanjutan. ■ TIF